

**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA BIDANG
PARIWISATA DAN TELEKOMUNIKASI**

NOTA DINAS

NOMOR : AK.03.01/65/D.I.M.EKON.2/07/2026

Yth : Plt. Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
Dari : Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Pariwisata dan
Telekomunikasi
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2026
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 13 Juli 2026

Sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban monitoring capaian indikator kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja secara periodik, bersama ini kami sampaikan **Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2026** yang telah disusun sesuai format dan ketentuan yang berlaku.

Laporan ini memuat capaian kinerja unit kerja kami pada Triwulan II Tahun 2026, yang telah disesuaikan dengan indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja dan pedoman penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan.

Demikian atas perhatian dan kerja sama Saudari, kami sampaikan terima kasih.

**Asisten Deputi Pengembangan BUMN
Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi**



**Puji Gunawan
NIP 197611181999031001**

Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026
Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi

A. Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026

Hasil pengukuran kinerja Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi Triwulan II Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulanan 2026	Realisasi Triwulan II	Capaian (%)
I	<i>Sasaran Program 1. Meningkatnya Produktivitas BUMN di Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi</i>					
1.1	Indikator 1.1 Jumlah Realisasi Belanja Modal BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi	Triliun	53,67	21.52	36.69	120
1.2	Indikator 1.2 Persentase Penyelesaian Penugasan Pemerintah kepada BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi	Persentase	80	40	40	100
II	<i>Sasaran Program 2 Tercapainya Jumlah Pemda yang Mampu Menyediakan Layanan ETPD Melalui Berbagai Kanal Pembayaran</i>					
2.1	Indikator 2.1 Persentase Jumlah Pemda yang Mampu Menyediakan Layanan ETPD Melalui Berbagai Kanal Pembayaran	Persentase	83	82.5	82.5	100
III	<i>Sasaran Program 3 Terwujudnya Kebijakan Pengembangan BUMN bidang Pariwisata dan Telekomunikasi yang berkualitas</i>					
3.1	Indikator 3.1 Persentase efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terkait pengembangan BUMN Bidang Pariwisata dalam penyelenggaraan Event dan Konektivitas Destinasi Pariwisata Super Prioritas	Persentase	80	40	40	100
3.2	Indikator 3.2 Persentase efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terkait pengembangan BUMN	Persentase	80	40	40	100

	Bidang Telekomunikasi melalui Investasi Perluasan Jaringan Telekomunikasi					
3.3	Indikator 3.3 Persentase efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terkait partisipasi pemda dalam survey Indeks ETPD	Persentase	80	40	40	100
IV	Sasaran Program 4. Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi yang Berkualitas					
4.1	Indikator 4.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi	Index	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	100
IV	Sasaran Program 5. Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi yang Berkualitas					
5.1	Indikator 5.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi	Persentase	92	40	40	100

Kinerja Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1	Sasaran Kegiatan 1. Meningkatnya Produktivitas BUMN di Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi
----------	--

Pencapaian Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Produktivitas BUMN di Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator kinerja yaitu:

1. Realisasi Jumlah Belanja Modal BUMN Bidang Pariwisata & Telekomunikasi
2. Persentase penyelesaian Penugasan Pemerintah kepada BUMN Pariwisata dan Telekomunikasi

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1. Realisasi Jumlah Belanja Modal BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi

Latar Belakang

Belanja modal (capital expenditure/capex) merupakan indikator penting untuk menilai komitmen investasi BUMN dalam memperluas kapasitas usaha dan mendukung agenda industrialisasi nasional. Tingkat realisasi Capex mencerminkan efektivitas eksekusi program kerja dan keseriusan BUMN dalam berkontribusi terhadap prioritas pembangunan. Oleh karena itu, pengukuran atas

persentase realisasi belanja modal menjadi relevan sebagai indikator kinerja utama bagi koordinasi Kemenko Perekonomian dalam mendorong akselerasi pertumbuhan sektor industri prioritas.

Upaya Pengembangan Usaha BUMN membutuhkan Capex yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk mendorong hal tersebut, dilakukan koordinasi dan monitoring pada BUMN bidang Pariwisata dan Telekomunikasi agar target persentase realisasi belanja modal tahun 2026 sebesar 60% berdasarkan cascading dalam Rencana Strategis Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN dapat tercapai.

BUMN bidang Pariwisata dan Telekomunikasi yang dikoordinasikan belanja modalnya yaitu pada BUMN yang memiliki kriteria di antaranya: merupakan BUMN dengan nilai aset besar dan kontribusi tinggi terhadap pendapatan negara, BUMN yang sudah tercatat di pasar modal (go public), atau BUMN sektor strategis yang belum/tidak tercatat di pasar modal, serta di bawah koordinasi Asisten Deputy Pengembangan BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi antara lain:

- a. Bidang Telekomunikasi, antara lain PT Telkom (Persero) Tbk, dengan target Capex Tahun 2026 sebesar Rp23,46 Triliun;
- b. Bidang Pariwisata, antara lain PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, dengan target Capex Tahun 2026 sebesar Rp16,65 Triliun dan PT Aviastar Pariwisata Indonesia (InJourney), dengan target Capex Tahun 2026 sebesar Rp13,56 Triliun .

Capaian realisasi belanja modal BUMN merupakan hasil dari akumulasi total nilai capex BUMN yang dikoordinasikan diukur menggunakan formula:

$$\text{Realisasi IKU 1.1} = X_1 + X_2 + X_3$$

Dengan keterangan:

X_1 = Belanja Modal PT Telkom

X_2 = Belanja Modal PT Garuda Indonesia

X_3 = Belanja Modal PT Aviastar Pariwisata

Realisasi capex adalah jumlah pengeluaran atau pembelian dari arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi. Data realisasi capex diperoleh dari laporan keuangan (unaudited), laporan aktualisasi capex triwulanan, atau proyeksi internal yang disampaikan oleh masing-masing BUMN pada triwulan berjalan yang disampaikan melalui proses koordinasi dan monitoring Asdep Pariwisata dan Telekomunikasi. Laporan dapat berupa proyeksi belanja atau realisasi dari laporan keuangan manajemen. Validitas data akan dikonfirmasi melalui perbandingan antar periode dan diskusi bersama pihak BUMN terkait.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar Rp 53,67 Triliun penetapan target tahun 2026 didasarkan pada Rencana Strategis Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN, RKP 2026 dan dokumen perencanaan BUMN. Adapun target triwulan II sebesar Rp 21,52 Triliun. Penetapan target triwulan II didasarkan pada tren realisasi belanja modal BUMN tahun sebelumnya serta adanya kecenderungan BUMN dalam melakukan belanja modal pada triwulan III dan IV pada akhir tahun.

Hingga Triwulan II Tahun 2026, proyeksi capex BUMN Sektor Pariwisata dan Telekomunikasi sebesar Rp 36.69 Triliun atau mencapai 68.37% dari target Tahun 2026 sebesar Rp 53,67 Triliun dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.1 Jumlah Belanja Modal BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi	Triliun	21,52 Triliun	36.69 Triliun	120% (Memuaskan)

Pengukuran kinerja IKU-1.1 triwulan II 2026 mencapai 120% atau sebesar Rp 36.69 Triliun dengan rincian sebagai berikut:

- Bidang Telekomunikasi, antara lain PT Telkom (Persero) Tbk, dengan proyeksi Capex Tahun 2026 sebesar Rp13,557 Triliun;
- Bidang Pariwisata, antara lain PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, dengan proyeksi Capex Tahun 2026 sebesar Rp11,835 Triliun dan PT Aviastar Pariwisata Indonesia (InJourney), dengan proyeksi Capex Tahun 2026 sebesar Rp11,304 Triliun.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

1.1 Jumlah Belanja Modal BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Monitoring dan evaluasi realisasi belanja modal (capex) BUMN Pariwisata dan Telekomunikasi TW I	Terlaksana	telah dilaksanakan melalui rakor dan audiensi level teknis
2.	Koordinasi penyelesaian isu strategi yg menghambat perluasan jaringan Fiber Optic dan Penggelaran Kabel Laut Pasela PT Telkom	Terlaksana	telah dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi di lapangan serta audiensi level teknis
3.	Koordinasi dan sinkronisasi progress perluasan Jaringan Fiber Optic dan Penggelaran Kabel Laut Pasela PT Telkom	Terlaksana	telah dilaksanakan melalui rakor dan audiensi level teknis

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- Forum Group Discussion (FGD) Apjatel "Sinergi Strategis untuk Kedaulatan Digital, Optimalisasi Barang Milik Daerah untuk Infrastruktur

- Telekomunikasi, Penetapan Tarif Batas Atas Infrastruktur Pasif, dan Deklarasi OVC”, 9 April 2026
2. FGD Tata Kelola Industri Over-The-Top (OTT) Celios, 9 April 2026
 3. Penerbitan Surat Permohonan data/informasi kebijakan Pemda terkait ekosistem digital daerah kepada tim Telkom Infrastruktur, 24 April 2026
 4. Rapat Koordinasi Pemetaan Dukungan Insentif Pengembangan Data Center, 30 April 2025
 5. Rapat Teknis Koordinasi Dukungan Insentif Pengembangan Data Center, 4 Mei 2026
 6. Tindak Lanjut Rapat Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II-2026 Sektor Ketenagakerjaan Industri Data Center, 13 Mei 2026
 7. Rapat Teknis Isu Hambatan Ekosistem Digital di Daerah, 20 Mei 2026
 8. Diseminasi Hasil Studi Tata Kelola Industri Over-The-Top (OTT) Celios, 2 Juni 2026
 9. Koordinasi dan Penyusunan Briefing Sheet for the Meeting between the Coordinating Minister for Economic Affairs and the Ambassador of the People's Republic of China to the Republic of Indonesia dengan PT Telkom, 8 Juni 2026
 10. Monitoring dan Evaluasi Ekosistem Digital, Data Center Provinsi Jawa Tengah, 10 Juni 2026
 11. Monitoring, Evaluasi, dan Diskusi Pungutan atas Infrastruktur Jaringan Telekomunikasi di Provinsi Lampung 10 Juni 2026

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya di antaranya pelaksanaan kegiatan yang mengoptimalkan ruang rapat kantor dan metode daring/hybrid menggunakan *video conference*. Proyeksi efisiensi diperkirakan bisa mencapai Rp10.000.000,- hingga Rp25.000.000,- untuk setiap kegiatan yang sebelumnya dilaksanakan dengan paket meeting. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan koordinasi lain yang sifatnya lebih strategis dan insidentil pada periode berikutnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Terdapat ketidaksesuaian antara jadwal pelaporan kinerja BUMN dengan kebutuhan data dan informasi untuk penyusunan laporan kinerja ini, sehingga data dan informasi dari BUMN belum sepenuhnya tersedia karena masih dalam tahap konsolidasi;
2. Koordinasi antar kementerian dan lembaga masih kompleks;

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Memperbarui data secara berkala guna mendukung pemantauan berkelanjutan atas pencapaian kinerja BUMN;
2. Meningkatkan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan lainnya dalam menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi;

**1.2. Persentase
Penyelesaian
Penugasan
Pemerintah kepada
BUMN Pariwisata
dan Telekomunikasi**

Latar Belakang

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang disebutkan mengacu pada persentase penyelesaian penugasan pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang Pariwisata dan Telekomunikasi. Penugasan pemerintah kepada BUMN Pariwisata dan Telekomunikasi yang dikoordinasikan diantaranya mencakup:

- a. Pelaksanaan Penugasan kepada InJourney melalui Surat Menhub kepada PT Angkasa Pura Indonesia, PT Angkasa Pura Aviassi, dan PT Bandara Internasional Batam No.PR303/1/8/MHB/2025 tentang Pengenaan Potongan Harga Tarif Jasa Kebandarudaraan Periode Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 .
- b. Penugasan kepada Garuda Indonesia dan Citilink melalui Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 50 tahun 2025 tentang Penurunan Besaran Biaya Tambahan Bahan Bakar (Fuel Surcharge) Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Selama Masa Hari Raya Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2025.

IKU ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan peran BUMN Pariwisata dan Telekomunikasi terkait konektivitas dan pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas serta investasi perluasan jaringan telekomunikasi untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk mencapai target penyelesaian penugasan pemerintah kepada BUMN bidang Pariwisata dan Telekomunikasi dilakukan melalui: kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi, dan penyusunan laporan dan/atau rekomendasi kebijakan penyelesaian penugasan pemerintah kepada BUMN bidang Pariwisata dan Telekomunikasi.

Penugasan dikatakan selesai apabila kebijakan telah diimplementasikan oleh BUMN terkait pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 2026.

Persentase Penyelesaian penugasan pemerintah kepada BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi dihitung dengan.

Realisasi IKU 1.2

$$\text{Persentase Realisasi Pelaksanaan Penugasan} = \frac{\text{Total Penugasan Pemerintah yang Diselesaikan}}{\text{Total Penugasan Pemerintah yang Ditetapkan}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 80%. Adapun target triwulan II sebesar 20%. Hingga Triwulan II Tahun 2026, Persentase Penyelesaian Penugasan Pemerintah kepada BUMN Pariwisata dan Telekomunikasi yang telah terealisasi sebesar 20% atau mencapai 25% dari target Tahun 2026 sebesar 80 % dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.2 Persentase Penyelesaian Penugasan Pemerintah kepada BUMN Pariwisata dan Telekomunikasi	Persentase	20	20	100 % (Memuaskan)

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

1.2 Persentase Penyelesaian Penugasan Pemerintah kepada BUMN Pariwisata dan Telekomunikasi			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan diskon tiket pesawat pasca idul fitri	Terlaksana	telah dilaksanakan melalui Rakor level eselon I dan rakor level teknis
2.	Monitoring pelaksanaan dan capaian kebijakan	Terlaksana	telah dilaksanakan melalui Rakor level eselon I dan rakor level teknis

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Rapat Pembahasan Dampak Kenaikan Avtur, 6 April 2026;
2. Public Hearing Insentif PPN DTP Tiket Pesawat Dampak Kenaikan Avtur, 7 April 2026;
3. Rakor pembahasan dampak kenaikan harga avtur bagi industri penerbangan, 7 Mei 2026;
4. Rapat Koordinasi Tingkat Eselon 1 Pemetaan Kebijakan Stimulus dalam rangka Mendorong Kontribusi Sektor Pariwisata bagi Pertumbuhan Ekonomi Semester II Tahun 2026, 9 Juni 2026;
5. Rapat Pleno Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi Pada Periode Libur Sekolah Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2026, 10 Juni 2026;

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya di antaranya pelaksanaan kegiatan yang mengoptimalkan ruang rapat kantor dan metode daring/hybrid menggunakan *video conference*. Proyeksi efisiensi diperkirakan bisa mencapai Rp10.000.000,- hingga Rp25.000.000,- untuk setiap kegiatan yang sebelumnya dilaksanakan dengan paket meeting. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan koordinasi lain yang sifatnya lebih strategis dan insidentil pada periode berikutnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Kendala regulasi dan koordinasi lintas sektor;
2. Keterbatasan infrastruktur.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. memperkuat koordinasi teknis melalui Rakor tingkat Menteri dan penugasan lintas sektor yang terintegrasi;
2. melakukan identifikasi risiko bencana serta menambah infrastruktur bersama K/L teknis.

2

Sasaran Kegiatan 2. Tercapainya Jumlah Pemda yang Mampu Menyediakan Layanan ETPD Melalui Berbagai Kanal Pembayaran

Pencapaian Sasaran Strategis 2: Tercapainya Jumlah Pemda yang Mampu Menyediakan Layanan ETPD Melalui Berbagai Kanal Pembayaran ditunjukkan oleh satu pencapaian indikator kinerja yaitu Persentase Jumlah Pemda yang Mampu Menyediakan Layanan ETPD Melalui Berbagai Kanal Pembayaran. Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1. Persentase Jumlah Pemda yang Mampu Menyediakan Layanan ETPD Melalui Berbagai Kanal Pembayaran

Latar Belakang

Persentase Jumlah Pemerintah Daerah yang mampu Menyediakan Layanan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Melalui Berbagai Kanal Pembayaran merupakan indikator yang menggambarkan kinerja salah satu komponen dari Indeks ETPD, yakni Aspek Implementasi.

Kemampuan Pemda dalam menyediakan layanan ETPD melalui berbagai kanal pembayaran mencerminkan tingkat adopsi teknologi dan digitalisasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Yang dimaksud dengan pemda yang “mampu” dalam hal ini adalah pemda yang seluruh jenis pajak, retribusi, dan belanja daerahnya sudah terelektronifikasi apapun kanal pembayarannya.

Kanal pembayaran yang beragam (seperti QRIS, internet/mobile banking, ATM/teller, hingga kanal non-tunai lainnya) tidak hanya memperluas akses masyarakat dalam melakukan transaksi dengan pemerintah daerah, tetapi juga mencerminkan kesiapan infrastruktur digital dan integrasi sistem di daerah tersebut. Hal ini dapat mendukung lebih banyak pemda untuk masuk dalam kategori digital berdasarkan Indeks ETPD, sebagaimana diukur dalam IKU Deputi. Target persentase pemda yang mampu menyediakan layanan ETPD di berbagai kanal pembayaran adalah sebesar 83%, dengan mempertimbangkan bahwa pencapaian IKU ini dapat mendukung pencapaian kinerja IKU Deputi.

Adapun peran Kemenko Perekonomian dalam forum Satgas P2DD untuk mendukung pencapaian target IKU mencakup (dan tidak terbatas pada):

1. Penguatan ekosistem (diantaranya melalui dukungan koordinasi penyediaan sarana/prasarana, koordinasi penyusunan regulasi terkait,

koordinasi pengusulan insentif daerah khusus untuk P2DD, koordinasi penguatan Bank RKUD, dll.)

2. Penguatan koordinasi (diantaranya melalui pelaksanaan Rakornas, Rakorpusda, Rakorwil, koordinasi tindak lanjut arahan Ketua Pengarah & Pelaksana Satgas P2DD dan koordinasi teknis lainnya)
3. Dukungan pelaksanaan survei
4. Sosialisasi dan Capacity Building Tim P2DD di daerah
5. Monitoring dan evaluasi
6. Penguatan peran Bank BPD selaku pengelola RKUD

IKU Persentase Jumlah Pemerintah Daerah yang mampu Menyediakan Layanan ETPD Melalui Berbagai Kanal Pembayaran dihitung dengan membandingkan jumlah Pemda yang telah melakukan elektronifikasi seluruh jenis pajak, retribusi, dan belanja daerahnya, dengan jumlah total Pemda di Indonesia. Perhitungan tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut dengan formula sebagai berikut:

$$\% \text{ Jumlah Pemerintah Daerah yang mampu Menyediakan Layanan ETPD} = \frac{(\text{Jumlah Pemda yang Mengelektronifikasi Seluruh Jenis Transaksi Daerah} \times 10)}{\text{Total Seluruh Pemda}}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 83%. Adapun target pelaporan dilakukan tiap semester yang diambil datanya dari hasil Survei Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, sehingga hingga Triwulan II Tahun 2026 belum terdapat realisasi, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.1 Persentase Jumlah Pemda yang Mampu Menyediakan Layanan ETPD Melalui Berbagai Kanal Pembayaran	Persentase	82,5	82,5	100 % (Memuaskan)

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

2.1 Persentase Jumlah Pemda yang Mampu Menyediakan Layanan ETPD Melalui Berbagai Kanal Pembayaran

No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Capacity Building terkait Layanan ETPD	Terlaksana	telah dilaksanakan melalui sosialisasi & capacity building di sejumlah pemda/BPD.
2.	Penilaian Evaluasi Kinerja TP2DD	Terlaksana	telah dilaksanakan melalui Penelaahan Dokumen Championships TP2DD 2026 di Jakarta pada 11 – 13 Mei 2026
3.	Penetapan Hasil Championship TP2DD (Rapat/Kepmenko)	Terlaksana	telah dilaksanakan melalui penyusunan rencana pembahasan awal rekomendasi shortlist penerima penghargaan TP2DD Award 2026
4.	Koordinasi Pelaksanaan Rakornas P2DD	Terlaksana	Telah dilaksanakan melalui pembahasan awal terkait estimasi penyelenggaraan Rakornas Pengendalian Inflasi & P2DD

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Capacity Building TP2DD se-Provinsi Banten, 1 April 2026
2. Capacity Building TP2DD se-Provinsi Maluku Utara, 1-2 April 2026
3. Capacity Building TP2DD se-Provinsi Jawa Barat, 6-8 April 2026
4. Capacity Building TP2DD Wilayah Kerja BI Sibolga, 6 April 2026
5. High Level Meeting TP2DD Kabupaten Sidoarjo, 6 April 2026
6. Capacity Building TP2DD se-Provinsi Sumatera Selatan, 7-8 April 2026
7. Pembahasan Policy Matrix Digitalisasi Daerah dengan ADB dalam Fact Finding Mission ADIL ADB, 9 April 2026
8. High Level Meeting TP2DD Kota Makassar, 9 April 2026
9. Capacity Building TP2DD Provinsi Sumatera Barat, 9-10 April 2026
10. Rapat dengan Bank Indonesia Pembahasan Pelaksanaan Katalis II P2DD 2026, 10 April 2026
11. Capacity Building TP2DD Provinsi Aceh, 13-14 April 2026
12. Capacity Building TP2DD Provinsi Lampung, 13-14 April 2026
13. Capacity Building TP2DD Se-Kalimantan, 20-21 April 2026
14. Capacity Building TP2DD Wilayah Kerja BI Jawa Timur, 20-22 April 2026
15. Rapat dengan Kementerian Keuangan Pembahasan Penyusunan Kebijakan Dana Insentif Fiskal TA 2026, 20 April 2026
16. Penyusunan, penetapan dan distribusi Surat kepada BPD, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, PT Telkom dan Jasa Raharja dalam rangka

fasilitasi penyediaan data pendukung Championships TP2DD 2026, April - Mei 2026

17. Diskusi terkait Strategi Percepatan ETPD dan Adaptasi Pembayaran Digital (Akselerasi KKI) dalam Studi Strategi Dalam Negeri Sekolah Pimpinan BI (SESPI) Semester I Tahun 2026, 5 Mei 2026
18. Rapat Persiapan Penelaahan dan Penilaian Dokumen Evaluasi Kinerja TP2DD 2026, 6-8 Mei 2026
19. Sosialisasi Program Katalis II P2DD X DIGDAYA, 6 Mei 2026
20. Kick Off Sosialisasi Implementasi KKI Pemerintah Fitur Online Payment di E-Katalog, 8 Mei 2026
21. Partisipasi sebagai Penguji dalam Final Project SESPI Semester I Tahun 2026 dengan topik Akselerasi ETPD dan KKI Segmen Pemerintah: Strategi Integratif untuk Optimalisasi Pendapatan dan Resiliensi Fiskal Daerah, 26 Mei 2026
22. Rapat Bilateral dengan Bank Indonesia Pembahasan Hasil Sementara Penilaian P2DD 2026 dan rencana Verifikasi Lapangan, 2 Juni 2026
23. Diskusi Penguatan Implementasi KKI Online Payment, Kesiapan BPD, dan Penguatan Aspek Evaluasi dan Penilaian pada Championships TP2DD di beberapa BPD, Mei-Juni 2026

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya di antaranya pelaksanaan kegiatan yang mengoptimalkan ruang rapat kantor dan metode daring/hybrid menggunakan *video conference*. Proyeksi efisiensi diperkirakan bisa mencapai Rp10.000.000,- hingga Rp25.000.000,- untuk setiap kegiatan yang sebelumnya dilaksanakan dengan paket meeting. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan koordinasi lain yang sifatnya lebih strategis dan insidental pada periode berikutnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Kesulitan menyatukan waktu dan komitmen berbagai pihak (K/L, Pemda) dalam rapat koordinasi, audiensi, maupun diskusi teknis.
2. Adanya perubahan struktur organisasi, nomenklatur, dan pejabat di K/L yang terkait.
3. Diterbitkannya Surat Edaran terkait efisiensi anggaran sehingga konsep/format rencana kegiatan perlu disesuaikan kembali. Selain itu, anggaran Keasdepan untuk Output P2DD masih terikat pada Kedeputan II, sehingga perlu koordinasi untuk penyesuaian Renja dan RAB.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai antara lain melalui peningkatan koordinasi lintas pihak secara lebih terstruktur, percepatan penyesuaian dokumen perencanaan dan anggaran, penyesuaian konsep/format kegiatan yang akan datang serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.

Pencapaian Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi yang Berkualitas ditunjukkan oleh tiga pencapaian indikator kinerja yaitu

1. Persentase Efektivitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pengembangan BUMN Bidang Pariwisata dalam Penyelenggaraan Event dan Konektivitas Destinasi Pariwisata Super Prioritas.
2. Persentase Efektivitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pengembangan BUMN Bidang Telekomunikasi melalui Investasi Perluasan Jaringan Telekomunikasi.
3. Persentase Efektivitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Partisipasi Pemda dalam Survei Indeks ETPD

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1. Persentase Efektivitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pengembangan BUMN Bidang Pariwisata dalam Penyelenggaraan Event dan Konektivitas Destinasi Pariwisata Super Prioritas

Latar Belakang

Persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait Pengembangan BUMN di Bidang Pariwisata dalam Penyelenggaraan Event dan Konektivitas Destinasi Pariwisata Super Prioritas. Proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan dapat ditindaklanjuti oleh K/L terkait dan kebijakan tersebut selanjutnya dilakukan evaluasi dengan menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi.

Kebijakan yang dikoordinasikan dalam rangka mencapai Persentase Efektivitas Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pengembangan BUMN di Bidang Pariwisata dalam Penyelenggaraan Event dan Konektivitas Destinasi Pariwisata Super Prioritas oleh BUMN antara lain:

Pemetaan isu strategis dan permasalahan terkait Penyelenggaraan Event BUMN Pariwisata serta Konektivitas Destinasi Pariwisata Super Prioritas

Sinkronisasi roadmap BUMN, pengumpulan data dan informasi terkait kalender Penyelenggaraan Event BUMN Pariwisata serta isu strategis terkait Konektivitas Destinasi Pariwisata Super Prioritas

Fasilitasi dukungan koordinasi dan Penguatan peran BUMN dalam penyelenggaraan Event BUMN Pariwisata serta Konektivitas Destinasi Pariwisata Super Prioritas dalam mendukung pertumbuhan ekonomi

Pengendalian pelaksanaan kebijakan melalui pemantauan dan evaluasi penguatan peran BUMN dalam Penyelenggaraan Event BUMN Pariwisata serta Konektivitas Destinasi Pariwisata Super Prioritas dalam mendukung pertumbuhan ekonomi

Tugas atau fungsi lainnya (ad hoc) adalah tugas di luar poin di atas, sebagai tindak lanjut arahan Presiden atau Menteri pada tahun berjalan.

1. Perhitungan Persentase Tahapan Pertama

$$\text{Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

2. Perhitungan Persentase Tahapan Kedua

$$\text{Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

3. Perhitungan Persentase Tahapan Ketiga

$$\text{Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

4. Perhitungan Persentase Tahapan Keempat

$$\text{Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

5. Nilai Akhir Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Pengembangan BUMN di Bidang Pariwisata dalam Penyelenggaraan Event dan Konektivitas Destinasi Pariwisata Super Prioritas

% efektivitas SKP

$$= \% \text{ Tahapan Pertama} + \% \text{ Tahapan Kedua} \\ + \% \text{ Tahapan ketiga} + \% \text{ Tahapan keempat}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 80%. Adapun target triwulan II sebesar 20%. Hingga Triwulan II Tahun 2026, Persentase Efektivitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pengembangan BUMN Bidang Pariwisata dalam Penyelenggaraan Event dan Konektivitas Destinasi Pariwisata Super Prioritas telah terealisasi sebesar 20% atau mencapai 25% dari target Tahun 2026 sebesar 80% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-3.1 Persentase Efektivitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pengembangan BUMN Bidang Pariwisata dalam Penyelenggaraan Event dan Konektivitas Destinasi Pariwisata Super Prioritas	Persentase	80	20	100 % (Memuaskan)

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

3.1 Persentase Efektivitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pengembangan BUMN Bidang Pariwisata dalam Penyelenggaraan Event dan Konektivitas Destinasi Pariwisata Super Prioritas

No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Penyusunan alternatif rekomendasi kebijakan penyelesaian isu strategis dan permasalahan terkait penyelenggaraan even BUMN Pariwisata serta Konektivitas Destinasi Pariwisata Super Prioritas	Terlaksana	telah dilaksanakan melalui FGD pemetaan isu, audiensi level Eselon II, audiensi level teknis

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Rapat Pembahasan Dampak Kenaikan Avtur, 6 April 2026;
2. Rakor tingkat Eselon I pembahasan perluasan kebijakan bebas visa guna mendukung peningkatan kontribusi sektor pariwisata nasional, 15 April 2026;
3. Sinkronisasi kebijakan pengembangan medical tourism dan penguatan peran strategis BIH di KEK kesehatan Sanur, 23 April 2026;
4. Rakor Pembahasan Lanjutan Pelaksanaan Kebijakan Kenaikan Biaya Avtur untuk Transportasi Pesawat Udara Angkutan Haji Tahun 2026, 7 Mei 2026;
5. Rapat Koordinasi Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II – 2026, 12 Mei 2026;
6. Rakor percepatan penyelesaian pembiayaan hosting fee penyelenggaraan MotoGP 2025, 20 Mei 2026;
7. Kunjungan kerja dan diskusi terkait Perkembangan Terkini Pembangunan dan Operasional Serta Rencana Pengembangan KEK Sanur, 9 Juni 2026
8. Diskusi potensi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dalam mendorong investasi dan pengembangan pariwisata, 17 Juni 2026;

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya di antaranya pelaksanaan kegiatan yang mengoptimalkan ruang rapat kantor dan metode daring/hybrid menggunakan *video conference*. Proyeksi efisiensi diperkirakan bisa mencapai Rp10.000.000,- hingga Rp25.000.000,- untuk setiap kegiatan yang sebelumnya dilaksanakan dengan paket meeting. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan koordinasi lain yang sifatnya lebih strategis dan insidental pada periode berikutnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Kompleksitas isu lintas sektor memerlukan koordinasi intensif antar K/L yang sering terhambat perbedaan prioritas, atau kewenangan;
2. Masih adanya keterbatasan data teknis atau legalitas, perizinan, pembiayaan dan ekosistem.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Dilakukan percepatan melalui rapat koordinasi lintas kementerian, konsinyering, serta penguatan peran Kemenko sebagai orkestrator utama untuk memastikan keputusan strategis tepat waktu dan komprehensif;
2. Dilakukan pendekatan kolaboratif antara sektor untuk mempercepat desain program dan mendorong pembiayaan kreatif yang terukur dampaknya.

3.2. Persentase Efektivitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pengembangan BUMN Bidang Telekomunikasi melalui Investasi Perluasan Jaringan Telekomunikasi

Latar Belakang

Persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait pengembangan BUMN Bidang Telekomunikasi melalui Investasi Perluasan Jaringan Telekomunikasi. Proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan dapat ditindaklanjuti oleh K/L terkait dan kebijakan tersebut selanjutnya dilakukan evaluasi dengan menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi.

Telekomunikasi merupakan salah satu pilar penting dalam mendukung pertumbuhan perekonomian nasional, diindikasikan oleh sektor Informasi dan Komunikasi sebagai sumber pertumbuhan ke-4 pada 2024 (0,50%) dan mampu tumbuh tinggi lebih dari 6,5 persen dalam 5 tahun terakhir, dimana pada triwulan III-2025 secara kumulatif tumbuh mencapai 8,44% (ctc). Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki komitmen untuk mempercepat digitalisasi nasional sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Dalam hal ini, BUMN yang bergerak di bidang telekomunikasi berperan penting sebagai motor penggerak pembangunan infrastruktur digital dan penyedia layanan telekomunikasi kepada publik yang terjangkau dan berkualitas. Kebijakan yang dikoordinasikan dalam rangka mencapai Persentase Efektivitas Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan ini antara lain:

- Pemetaan isu strategis dan permasalahan terkait pengembangan BUMN Bidang Telekomunikasi melalui Investasi Perluasan Jaringan Telekomunikasi;
- Sinkronisasi roadmap BUMN, pengumpulan data dan informasi terkait Belanja Modal (capex) pengembangan BUMN Bidang Telekomunikasi melalui Investasi Perluasan Jaringan Telekomunikasi;
- Fasilitasi dukungan koordinasi dan Penguatan peran BUMN dalam pengembangan BUMN Bidang Telekomunikasi melalui Investasi Perluasan Jaringan Telekomunikasi dalam pencapaian target pertumbuhan ekonomi;

- Pengendalian pelaksanaan kebijakan melalui pemantauan dan evaluasi penguatan peran BUMN dalam pengembangan BUMN Bidang Telekomunikasi melalui Investasi Perluasan Jaringan Telekomunikasi;
- Tugas atau fungsi lainnya (ad hoc) adalah tugas di luar poin di atas, sebagai tindak lanjut arahan Presiden atau Menteri pada tahun berjalan.

1. Perhitungan Persentase Tahapan Pertama

$$\text{Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

2. Perhitungan Persentase Tahapan Kedua

$$\text{Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

3. Perhitungan Persentase Tahapan Ketiga

$$\text{Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

4. Perhitungan Persentase Tahapan Keempat

$$\text{Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

5. Nilai Akhir Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait BUMN Pariwisata dan Telekomunikasi
% efektivitas SKP

$$= \% \text{Tahapan Pertama} + \% \text{Tahapan Kedua} \\ + \% \text{Tahapan ketiga} + \% \text{Tahapan keempat keempat}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 80%. Adapun target triwulan II sebesar 20%. Hingga Triwulan II Tahun 2026, Persentase Efektivitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pengembangan BUMN Bidang Telekomunikasi melalui Investasi Perluasan Jaringan Telekomunikasi telah terealisasi sebesar 20% atau mencapai 25% dari target Tahun 2026 sebesar 80% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-3.2 Persentase Efektivitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pengembangan BUMN Bidang Telekomunikasi melalui Investasi Perluasan Jaringan Telekomunikasi	Persentase	80	20	100 % (Memuaskan)

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

3.2 Persentase Efektivitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pengembangan BUMN Bidang Telekomunikasi melalui Investasi Perluasan Jaringan Telekomunikasi

No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Penyusunan alternatif penyelesaian isu strategis dan permasalahan terkait pengembangan usaha BUMN Bidang Telekomunikasi melalui Perluasan Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi	Terlaksana	telah dilaksanakan melalui FGD dan diskusi teknis
2.	Koordinasi Kebijakan yang mendukung layanan sinyal utamanya di wilayah blankspot melalui skema alternatif	Terlaksana	telah dilaksanakan melalui FGD dan diskusi teknis
3.	Koordinasi percepatan perizinan dalam rangka investasi perluasan penyelenggaraan jaringan	Belum Terlaksana	Dijadwalkan Ulang pada TW III atau IV
4.	Koordinasi penyusunan kajian pengembangan BUMN Telekomunikasi	Terlaksana	telah dilaksanakan melalui FGD dan diskusi teknis
5.	Koordinasi penyusunan Rekomendasi Kebijakan Ekosistem Digital Daerah	Terlaksana	telah dilaksanakan melalui FGD dan diskusi teknis

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Forum Group Discussion (FGD) Apjatel “Sinergi Strategis untuk Kedaulatan Digital, Optimalisasi Barang Milik Daerah untuk Infrastruktur Telekomunikasi, Penetapan Tarif Batas Atas Infrastruktur Pasif, dan Deklarasi OVC”, 9 April 2026
2. FGD Tata Kelola Industri Over-The-Top (OTT) Celios, 9 April 2026
3. Penerbitan Surat Permohonan data/informasi kebijakan Pemda terkait ekosistem digital daerah kepada tim Telkom Infrastruktur, 24 April 2026
4. Rapat Teknis Koordinasi Dukungan Insentif Pengembangan Data Center, 4 Mei 2026
5. Rapat Teknis Isu Hambatan Ekosistem Digital di Daerah, 20 Mei 2026
6. Diseminasi Hasil Studi Tata Kelola Industri Over-The-Top (OTT) Celios, 2 Juni 2026

7. Monitoring dan Evaluasi Ekosistem Digital, Data Center Provinsi Jawa Tengah, 10 Juni 2026
8. Monitoring, Evaluasi, dan Diskusi Pungutan atas Infrastruktur Jaringan Telekomunikasi di Provinsi Lampung 10 Juni 2026

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya di antaranya pelaksanaan kegiatan yang mengoptimalkan ruang rapat kantor dan metode daring/hybrid menggunakan *video conference*. Proyeksi efisiensi diperkirakan bisa mencapai Rp10.000.000,- hingga Rp25.000.000,- untuk setiap kegiatan yang sebelumnya dilaksanakan dengan paket meeting. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan koordinasi lain yang sifatnya lebih strategis dan insidental pada periode berikutnya.

Terdapat 1 kegiatan yang belum terlaksana sesuai jadwal yaitu Koordinasi percepatan perizinan dalam rangka investasi perluasan penyelenggaraan jaringan, dan akan dijadwalkan ulang pada triwulan ke III atau ke IV dengan menyesuaikan jadwal para pihak. Belum terlaksananya kegiatan tersebut dikarenakan terdapat isu strategis lain yang mendesak dan disposisi dari pimpinan yaitu mengenai industri data center nasional. Untuk menjaga momentum, isu tersebut didahulukan untuk ditangani unit kerja melalui koordinasi dengan para pihak. Selain itu, isu perizinan terkait jaringan telekomunikasi merupakan kegiatan dengan rentang waktu yang panjang dan membutuhkan waktu serta koordinasi, sehingga penundaan kegiatan tidak berpengaruh signifikan terhadap output maupun outcome IKU.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Terdapat tantangan dalam menyelaraskan rencana pengembangan infrastruktur antara pemerintah, BUMN, dan kebutuhan daerah, terutama di wilayah blankspot.
2. Keterbatasan infrastruktur penunjang (lahan, daya listrik, akses jalan) menghambat percepatan pembangunan menara dan jaringan sinyal.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai: (rumusan rekomendasi/upaya perbaikan demi tercapainya target kinerja)

1. Dilakukan koordinasi lintas kementerian dan BUMN untuk pemetaan prioritas wilayah, serta percepatan integrasi data infrastruktur melalui sistem digital bersama;
2. Mendorong Pemda agar proaktif dalam memberikan dukungan akses dan perizinan.

3.3. Persentase Efektivitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Partisipasi Pemda

Latar Belakang

Persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait Partisipasi Pemda dalam Survei Indeks ETPD. Proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan dapat ditindaklanjuti oleh K/L terkait dan kebijakan tersebut selanjutnya dilakukan evaluasi dengan menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi.

dalam Survei Indeks ETPD

Kebijakan yang dikoordinasikan dalam rangka mencapai Persentase Efektivitas Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Partisipasi Pemda dalam Survei Indeks ETPD, yaitu:

- Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian ETPD Tahun 2025
- Pembahasan Pengembangan Metode Survei Indeks ETPD
- Pelaksanaan dan Pemantauan Partisipasi Survei Indeks ETPD
- Monitoring dan Evaluasi terkait Ekosistem/Perkembangan ETPD
- Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian ETPD Semester II 2025
- Monitoring dan Evaluasi terkait Ekosistem/Perkembangan ETPD
- Koordinasi Tindak Lanjut dalam Rapat Sekretariat Satgas P2DD terkait Indeks ETPD
- Pelaksanaan dan Pemantauan Partisipasi Survei Indeks ETPD

1. Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama

$$\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

2. Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua

$$\text{Nilai Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

3. Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga

$$\begin{aligned} \text{Nilai Tahapan Ketiga} \\ = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan}} \times 27,5\% \end{aligned}$$

4. Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat

$$\text{Nilai Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

5. Nilai Akhir Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Terkait Partisipasi Pemda dalam Survei Indeks ETPD

$$\% \text{Efektivitas SKP} = \% \text{Tahapan Pertama} + \dots + \% \text{Tahapan keempat}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 80%. Adapun target triwulan sebesar 20%. Hingga Triwulan II Tahun 2026, Persentase Efektivitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Partisipasi Pemda dalam Survei Indeks ETPD telah terealisasi sebesar 20% atau mencapai 25% dari target Tahun 2026 sebesar 80% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-3.3 Persentase Efektivitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Partisipasi Pemda dalam Survei Indeks ETPD	Persentase	80	20	100 % (Memuaskan)

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

3.3 Persentase Efektivitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Partisipasi Pemda dalam Survei Indeks ETPD			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Pembahasan Rencana Implementasi Alat Monitoring ETPD	Terlaksana	Telah dilaksanakan melalui penyusunan, penetapan, dan distribusi Surat perihal Survei Indeks ETPD Semester I Tahun 2026, pada Juni 2026
2	Monev terkait Ekosistem/Perkembangan ETPD	Terlaksana	telah dilaksanakan melalui Monev dan Diskusi terkait Infrastruktur Jaringan Telekomunikasi, serta Peninjauan Lapangan terkait ETPD, Juni 2026

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Kick Off Sosialisasi Implementasi KKI Pemerintah Fitur Online Payment di E-Katalog, 8 Mei 2026
2. Penyusunan, penetapan dan distribusi surat ke seluruh BPD perihal Kuesioner Gap Analysis BPD dalam Mendukung Kebijakan P2DD, Mei 2026
3. Rapat dengan Kemendagri terkait Kesepahaman Penerapan Petunjuk Teknis Penyusunan Peta Jalan dan Rencana Aksi Implementasi ETPD serta Penjaringan Masukan atas Rencana Perubahan Permendagri 56/2021 tentang TP2DD Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara IETPD, 9 Juni 2026
4. Pertemuan dan Diskusi dengan Bank Jakarta terkait upaya mendorong ETPD dan peningkatan kualitas layanan keuangan daerah, 24 Juni 2026
5. Telah melampirkan substansi untuk penguatan metode monitoring dan evaluasi ETPD di dalam Surat Menko Perekonomian tentang Arah Kebijakan dan Program Kerja Satgas P2DD Tahun 2026, Februari 2026;
6. Penyusunan rencana penguatan metode monitoring dan evaluasi ETPD, April-Juni 2026.
7. Pendokumentasian masukan pemda dan BPD terkait metode monitoring dan evaluasi ETPD, April-Juni 2026.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi

penggunaan sumber daya di antaranya pelaksanaan kegiatan yang mengoptimalkan ruang rapat kantor dan metode daring/hybrid menggunakan *video conference*. Proyeksi efisiensi diperkirakan bisa mencapai Rp10.000.000,- hingga Rp25.000.000,- untuk setiap kegiatan yang sebelumnya dilaksanakan dengan paket meeting. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan koordinasi lain yang sifatnya lebih strategis dan insidental pada periode berikutnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Partisipasi dan kualitas pengisian belum optimal, dimana sebagian kecil pemda & BPD tidak dapat mengikuti sosialisasi secara penuh karena keterbatasan waktu, kesibukan operasional, atau kendala teknis (jika dilakukan daring).
2. Tingkat pemahaman tidak merata, dengan pengisi survei dan pemilik/pengelola data memiliki latar belakang dan tingkat pemahaman yang berbeda terhadap materi ETPD, sehingga terjadi kesenjangan pemahaman selama survei berlangsung.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Peningkatan metode penyampaian materi: Mengoptimalkan metode penyampaian dengan kombinasi penjelasan terstruktur, sesi tanya jawab interaktif, dan simulasi pengisian, sehingga peserta lebih mudah memahami materi serta termotivasi untuk berpartisipasi secara penuh.
2. Penyediaan materi lanjutan: Memberikan bahan presentasi, video rekaman, dan akses konsultasi lanjutan pasca-sosialisasi untuk memperkuat pemahaman dan tindak lanjut di daerah masing-masing.

4	Sasaran Kegiatan 4. Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi yang Berkualitas
----------	--

Pencapaian Sasaran Strategis 4: Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi yang Berkualitas ditunjukkan oleh satu pencapaian indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1. Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi

Latar Belakang

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Asisten Deputi Bidang Pengembangan BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi dengan melakukan survey pelayanan ke Kementerian/Lembaga/ Stakeholder terkait. Survey ini mengukur 2 Aspek yakni (1) Aspek Kepuasan Penyelenggaraan Layanan dan (2) Aspek Kepuasan Substansi Layanan. Masing-masing aspek tersebut diwakili oleh beberapa indikator. Survey ini terdiri atas 24 item dan menggunakan skala likert

dengan skala 1 sampai 4. Survey akan dilakukan dengan menggunakan Google Form.

Mengukur indikator tingkat Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi dengan melakukan survey pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan empat kategori penilaian, yaitu (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas, rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{array}{l} \text{Indeks Kepuasan} \\ \text{Layanan Koordinasi,} \\ \text{Sinkronisasi dan} \\ \text{Pengendalian} \end{array} = \frac{\Sigma \text{Rerata jawaban dari masing-masing item survey}}{\text{Jumlah Item Survey}}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 3 dari 4. Adapun target triwulan II tidak ada karena survei dilakukan tiap semester. Hingga Triwulan II Tahun 2026 tidak ada realisasi, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-4.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi	Persentase	-	-	100 % (Memuaskan)

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

4.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Pelaksanaan dan pelaporan survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian BUMN Bidang	Terlaksana	telah dilaksanakan melalui pembuatan konsep survei dan

	Pariwisata dan Telekomunikasi Semester I 2026		pengumpulan data responden
2.	Penguatan engagement dengan stakeholder (kehadiran aktif dalam forum koordinasi/undangan)	Terlaksana	telah dilaksanakan keterlibatan aktif dalam rapat, audiensi dan forum diskusi bersama stakeholder untuk memperkuat kerja sama antar pihak terkait
3.	Koordinasi pemeliharaan dan optimalisasi pemanfaatan sistem (SIP2D) bersama K/L terkait	Terlaksana	Telah dilaksanakan koordinasi teknis dengan Komdigi terkait optimalisasi pemanfaatan sistem dan penguatan fungsi aplikasi
4.	Pelaksanaan layanan helpdesk dan pendampingan stakeholder	Terlaksana	Telah dilaksanakan layanan helpdesk dan pendampingan stakeholder melalui koordinasi dan komunikasi aktif, termasuk pemberian respons atas permintaan data/informasi, konsultasi terkait isu BUMN pariwisata dan telekomunikasi, serta fasilitasi tindak lanjut
5.	Optimalisasi pemanfaatan data dari SIP2DD dengan K/L terkait serta TP2DD	Terlaksana	Telah dilaksanakan melalui koordinasi dalam rangka optimalisasi pemanfaatan data dari SIP2DD serta penguatan sinergi dalam mendukung implementasi P2DD
6.	Koordinasi debottlenecking isu-isu strategis BUMN Pariwisata dan Telekomunikasi.	Terlaksana	Telah dilaksanakan rapat dan diskusi dengan BUMN terkait dalam rangka debottlenecking isu-isu strategis BUMN

			Pariwisata dan Telekomunikasi
--	--	--	-------------------------------

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Pelaksanaan dan pelaporan survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi Semester I 2026
2. Konsinyering penyusunan kebijakan pemanfaatan skema khusus bab 98 bagi industri MRO pesawat udara, 10 April 2026;
3. Rakor tingkat Eselon I pembahasan perluasan kebijakan bebas visa guna mendukung peningkatan kontribusi sektor pariwisata nasional, 15 April 2026;
4. Sinkronisasi kebijakan pengembangan medical tourism dan penguatan peran strategis BIH di KEK kesehatan Sanur, 23 April 2026;
5. Rapat Pembahasan Lanjutan atas Usulan Penetapan Program Penataan BUMN dan Anak Usaha BUMN menjadi PSN, 8 Mei 2026;
6. Rapat Pembahasan Streamlining Anak Usaha PTPN Group, 4 Juni 2026;
7. Kunjungan kerja dan diskusi terkait Perkembangan Terkini Pembangunan dan Operasional Serta Rencana Pengembangan KEK Sanur, 9 Juni 2026;
8. Rapat Koordinasi Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Perlakuan PPh atas Royalti Penulis, 11 Juni 2026;
9. Diskusi potensi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dalam mendorong investasi dan pengembangan pariwisata, 17 Juni 2026;
10. Rapat Tindak Lanjut Pembahasan Streamlining Anak Usaha PTPN Group, 26 Juni 2026;
11. Pelaksanaan helpdesk SIP2DD untuk pemda dan K/L Satgas P2DD melalui surel, sambungan telepon, maupun *chat whatsapp* selama masa Evaluasi Kinerja TP2DD 2026 dari 10 Februari 2026 hingga 24 April 2026.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya di antaranya pelaksanaan kegiatan yang mengoptimalkan ruang rapat kantor dan metode daring/hybrid menggunakan *video conference*. Proyeksi efisiensi diperkirakan bisa mencapai Rp10.000.000,- hingga Rp25.000.000,- untuk setiap kegiatan yang sebelumnya dilaksanakan dengan paket meeting. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan koordinasi lain yang sifatnya lebih strategis dan insidentil pada periode berikutnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut adalah tidak semua responden merespon dengan baik kuesioner yang disampaikan sehingga timeline survei bergeser.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai yaitu meningkatkan jumlah responden agar timeline survei dapat tepat waktu.

Pencapaian Sasaran Strategis 4: Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi yang Berkualitas ditunjukkan oleh satu pencapaian indikator kinerja yaitu Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1. Persentase

Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi

Latar Belakang

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi merupakan indikator yang menggambarkan keberhasilan pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Asisten Deputi didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan/ atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi. Implementasi kegiatan RB General dan/ atau Tematik harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun sebagaimana diatur dalam peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Rencana Aksi Asisten Deputi terkait pemenuhan:

1. Tingkat Capaian Kebijakan Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai
2. Tingkat Maturitas SPIP
3. Nilai SAKIP
4. Indeks Perencanaan Pembangunan
5. Tingkat Digitalisasi Arsip

Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan RB Tematik di Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan persentase pelaksanaan rencana aksi RB Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi:

$$\% \text{ Pelaksanaan Renaksi RB} = \frac{\text{Total Renaksi RB yang dilaksanakan}}{\text{Total Renaksi RB yang dirumuskan}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 92%. Adapun target triwulan I sebesar 20%. Hingga Triwulan II Tahun 2026, Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi telah terealisasi sebesar 20% atau mencapai 21,74% dari target Tahun 2026 sebesar 92% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-5.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi	Persentase	92	20	100 % (Memuaskan)

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

5.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan	Terlaksana	telah dilakukan Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan
2.	Penyusunan Revisi Renja 2026	Terlaksana	telah dilakukan Penyusunan Renja 2026
3.	Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI	Terlaksana	telah dilakukan optimalisasi arsip digital melalui aplikasi srikandi

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Manual IKU;
2. Melakukan Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan;
3. Melakukan Penyusunan Revisi Renja 2026;
4. Melakukan Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI;
5. Diskusi Kearsipan Internal: Pendampingan Persiapan Pemenuhan Bukti Dukung Pengawasan Kearsipan Internal, 25 Mei 2026;
6. Entry Meeting Pengawasan Kearsipan Internal, 3 Juni 2026;
7. Finalisasi Penyusunan Rencana Aksi dan Manual IKU, 16 Juni 2026;
8. Verifikasi Formulir ASKI (Audit Sistem Kearsipan Internal) Pengawasan Kearsipan Internal, 17 Juni 2026;
9. Visitasi Kearsipan Internal Kedeputian 1, 24 Juni 2026;

10. Finalisasi Manual IKU, Renaksi dan SK Pokja, 26 Juni 2026;
11. Rapat Pembahasan Penyusunan IKU Tahun 2026, pada 7 Maret 2026;
12. Diskusi Sosialisasi Mekanisme Kerja, pada 10 Maret 2026.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya di antaranya pelaksanaan kegiatan yang mengoptimalkan ruang rapat kantor dan metode daring/hybrid menggunakan *video conference*. Proyeksi efisiensi diperkirakan bisa mencapai Rp10.000.000,- hingga Rp25.000.000,- untuk setiap kegiatan yang sebelumnya dilaksanakan dengan paket meeting. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan koordinasi lain yang sifatnya lebih strategis dan insidentil pada periode berikutnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Proses pengumpulan data kinerja sering terlambat atau tidak seragam antar unit, yang berdampak pada revisi Renja dan pelaporan triwulanan;
2. Sistem SRIKANDI kadang mengalami kendala teknis (akses lambat, error upload), serta belum semua pegawai memahami tata kelola dokumen elektronik sesuai ketentuan.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Disiapkan jadwal pelaporan yang disiplin, penggunaan template standar;
2. Dilakukan pelatihan internal secara berkala, penyusunan panduan ringkas, dan koordinasi aktif dengan tim helpdesk SRIKANDI untuk troubleshooting dan optimalisasi sistem.

Jakarta, 10 Juli 2026

Asisten Deputi Pengembangan BUMN
Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi



Puji Gunawan